

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan Pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang Kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarustamaan Gender di Kota Bekasi;
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain:

1. Maksud

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke dalam dokumen perencanaan tahunan;
- b. Implementasi tugas dan fungsi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaksanaan tahun 2025.

2. Tujuan

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2025;
- b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
- c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA DISKOPUKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISKOPUKM

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD.

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, abik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempedomani Renstra perubahan tahun 2024-2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOPUKM

Pada bagian ini berisikan table rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025.

4.1 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rancangan awal Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis. Tercapai tidaknya sasaran strategis dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dan hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan tahun berjalan Tahun 2024. Program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis, yang terdiri dari 8 Program, 13 Kegiatan, 22 Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mencapai sasaran strategisnya pada Tahun 2023 adalah Rp 13.900.511.220,- dengan realisasi sebesar Rp 12.010.576.199,- atau 86,40%. Dari target capaian kinerja sasaran yang berjumlah 4 indikator secara keseluruhan sudah tercapai sepenuhnya. Sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akip. Di tahun 2023 target nilai AKIP sebesar 70 dengan realisasi sebesar 76.01, capaian kinerja untuk tahun ini sebesar 108.58%. Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM dengan tiga Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi. Di tahun 2023 indikator kinerja persentase kontribusi sektor koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.102% dengan realisasi 0.296%, capaian untuk tahun ini sebesar 290%. Indikator kinerja persentase kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki target sebesar 0.07%, dengan realisasi 0.08%, capaian untuk

tahun ini sebesar 114.28%. Indikator kinerja persentase peningkatan tingkat kesehatan koperasi dengan penetapan tergetnya sebesar 20%, dengan realisasi 25%, dan mempunyai capaian kinerja sebesar 125%.

Melihat capaian kinerja sasaran tahun 2023 secara keseluruhan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang mencapai lebih dari 100%. Dalam empat indikator kinerja memiliki delapan program/kegiatan, diantaranya adalah : (1) program penguji urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, (2) program pelayanan izin usaha simpan pinjam, (3) program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, (4) program penilaian kesehatan KSP/USP, (5) program pendidikan dan latihan perkoperasian, (6) program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, (7) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), (8) program pengembangan UMKM. Dari kedelapan program/kegiatan tersebut ada dua program/kegiatan yang melebihi target capaian kinerja, yang pertama adalah program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator kinerja jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pendidikan perkoperasian dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 100 orang pengurus, dan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 150 orang pengurus. Target capaian yang kedua adalah program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator kinerja persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan yang memiliki target capaian kinerja yang telah ditetapkan 10%, dan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 11.09%.

Program/kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja yaitu program pelayanan izin usaha simpan pinjam dari terget yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 8.17% dengan capaian sampai dengan triwulan IV sebesar 1.63%. Faktor tidak tercapainya indikator kinerja persentase koperasi yang memiliki izin simpan pinjam pada program pelayanan izin usaha simpan pinjam disebabkan oleh proses moratorium Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan September, dan di bulan November dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM tentang *Self Declare*. *Self Declare* ini

mendorong koperasi untuk melakukan pernyataan bahwa koperasi tersebut melakukan operasional secara tertutup atau terbuka. Jika tertutup artinya koperasi hanya melayani anggotanya saja dengan pengawasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan pelayanan terbuka adalah koperasi dapat melayani masyarakat luas dengan pengawasan OJK. Hal ini yang menjadi hambatan terbitnya izin simpan pinjam, dari target 50 koperasi yang memiliki izin simpan pinjam hanya 10 koperasi yang terealisasi.

Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal memiliki kelompok sasaran layanan yaitu Koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah UMKM binaan (SIP3) mencapai 7.904 unit usaha, yang jumlahnya akan terus bertambah sesuai target pendataan UMKM dari Kementerian Koperasi, UKM di Kota Bekasi sebanyak 9.600 unit usaha.

Menurut data *Online Data System* (ODS) jumlah koperasi keseluruhan yang ada di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.547 unit. Dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.284 unit.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Usaha Informal yang sudah menempati tempat yang telah ditetapkan mencapai 613 unit usaha yang tersebar di 21 lokasi binaan. Sedangkan jumlah usaha informal sampai dengan tahun 2023 mencapai 2.028 unit usaha.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk bidang perkoperasian, UMKM dan sektor informal diantaranya sebagai berikut :

1. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi/modal sendiri masih rendah;
2. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena *basic*/ dasar pendidikan para pengurus bervariasi;

3. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi / modal sendiri masih rendah;
4. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena *basic*/dasar pendidikan para pengurus bervariasi;
5. Belum terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi karena koperasi belum mendapatkan proteksi dalam bentuk jaminan pemerintah (lembaga penjamin simpanan) seperti lembaga keuangan;
6. Respon pelaku UMKM terhadap kegiatan sangat kurang dikarenakan pelaku UMKM sulit meninggalkan kegiatan bisnis kesehariannya;
7. Kemampuan Pendidikan pelaku UMKM sangat bervariasi sehingga sulit menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan atau program;
8. Keterbatasan akses pasar dan modal dikarenakan ukuran aktifitas bisnisnya sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan *networkingnya*;
9. Terbatasnya lahan untuk relokasi PKL;
10. Rendahnya kesadaran hukum PKL;
11. Belum maksimalnya penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ataupun kepada oknum yang memanfaatkan PKL.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan dalam pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi antara lain :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
2. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM berbasis kolaborasi;
4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;

5. Peningkatan Kerjasama dengan DKM Masjid untuk mewujudkan Koperasi berbasis syariah;
6. Peningkatan Database KUMKM.

Agar tujuan serta sasaran strategis dapat dicapai maka disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan UMKM baik produk maupun SDM nya melalui pelatihan dan fasilitasi;
3. Memperbanyak dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk;
4. Memfasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha;
5. Fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat;
6. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah;
7. Meningkatkan sosialisasi perkoperasian dan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian melalui optimalisasi penyuluhanm informasi, dan kemudahan dalam pemberian aspek legal dan karya nyata koperasi.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif melalui penyederhanaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan peningkatan kapasitas SDM aparatur;
2. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung bagi Koperasi dan UMKM;
3. Peningkatan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi, *Start Up Digitalisasi Marketing* (inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi *Simpkl.go.id* yang online sehingga dapat diakses oleh operator di Kecamatan se-Kota Bekasi.

Tahun 2025 sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdapat 2 yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM;
2. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.

Adapun capaian realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
1.01	Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	96.52	100	96.52	96.52	100	-	-
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	93.04	100	100	100	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	100	100	100	-	-	100	-	-
		Optimalisai Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	-	-	100	-	-
2.17.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/Bulan	448 Orang/Bulan 384 Orang/Bulan	776 Orang/Bln	776 Orang/Bln	79.84	784 Orang/Bulan	-	-
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	82.15	1 Laporan	-	-
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	82.20	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	9.140 Unit	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	-	-
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	88 Unit	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	-	-
				52.718 Lembar						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.418 Buku/Eks	120 Dokumen	120 Dokumen	100	12 Dokumen	-	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	25 Laporan	25 Laporan	100	12 Laporan	-	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55 Kali	50 Laporan	50 Laporan	100	12 Laporan	-	-
2.17.01.2.06.10	Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	2 Box	800 Dokumen	800 Dokumen	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	16 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	-	-
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	-	12 Unit	12 Unit	100	14 Unit	-	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	68 Unit	45 Unit	45 Unit	100	45 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	2.00	59.00	13.07	76.67	10.02	2.00	-	-
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapat Izin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	100 Unit Usaha	59 Koperasi	150 Unit	76.67	76.67	100 Unit Usaha	-	-
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Memiliki Izin USP 18 Koperasi Jumlah Peserta Sosialisasi Perijinan Simpan Pinjam dan OSS 110 Koperasi	150 Unit	115 Unit	76.67	100 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10.00	100	100 Unit Usaha	100	100	10.00	-	-
2.17.03.2.01	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	116 Unit Usaha	100	100 Unit Usaha	100	100	116 Unit Usaha	-	-
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Keukuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	Jumlah Koperasi yang Mematuhi Peraturan Perkoperasian 100	100 Unit	100	100	100 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi 200						
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4.00	83.33	8.17 %	100	8.17	4.00	-	-
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	65 Unit Usaha	83.33	100	100	100	65 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	65 Unit Usaha	50 Koperasi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100	65 Unit Usaha	-	-
				180 Orang						
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	-	89.38	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100	-	-	-
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	3.00	100	100 Orang Pengurus	100	100	3.00	-	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	720 Orang	100	100 Orang Pengurus	100	100	150 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	720 Orang	290 Koperasi	600 Orang Pengurus	600	100	150 Orang	-	-
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Skala Usahanya	0.2	2.00	2.00	87.73	1.75	0.2	-	-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti seluruh Pendidikan Perkoperasian	1.050 Unit Usaha	800 Koperasi	2 Koperasi	87.73	87.73	1.050 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.050 Unit Usaha	77.33	163 Unit Usaha	143	87.73	125 Unit Usaha	-	-
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Peresentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	10.00	86.11	15.00	100	15.00	10.00	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan	10.00	86.11	100	100	100	10.00	-	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	-	40.00	75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	100	10 Unit Usaha	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	75 Unit Usaha	2 Dokumen 2 Lokasi 410 Orang 2 Lokasi Binaan 1 Aplikasi	60 Orang	60 Orang	100	75 Unit Usaha	-	-
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	50.00	279 Orang	279 Orang	100	100 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1	97.57	1.00	100	1.00	0.1	-	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	0.1	97.57	100	100	100	100	-	-
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain Teknologi	1.350 Unit Usaha	1.385 Unit Usaha	1.152 Unit Usaha	1.152 Unit Usaha	100	1.000 Unit Usaha	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2023 (n-2)	Th 2024 (n-1)	Th 2025 (n)	Thn 2026 (n+1)	Th 2023 (n-2)	Th 2024 (n-1)	Th 2025 (n)	Th 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam			8.17 %	2 %	2 %	2 %	1.63	-	-	-	
2	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya			-	0.2 %	0.2 %	0.2 %	-	-	-	-	
3	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	1	-	-	-	
4	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang Telah Ditentukan			10 %	10%	10%	10%	11.09	-	-	-	
5	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian			100 Unit	10 %	10 %	10 %	100	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2023 (n-2)	Th 2024 (n-1)	Th 2025 (n)	Thn 2026 (n+1)	Th 2023 (n-2)	Th 2024 (n-1)	Th 2025 (n)	Th 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya			8.17 %	4 %	4 %	4 %	8.17	-	-	-	
7	Persentase Pengurus Koperasi yang Telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian			100 Orang Pengurus	3 %	3 %	3 %	150	-	-	-	
8	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas			10 %	12.08 %	12.08 %	12.08 %	14.13	-	-	-	
9	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha			20 %	21.21 %	21.21 %	21.21 %	36.07	-	-	-	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat

Daerah

A. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/Lembaga Tingkat pusat dan perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintah daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

1. Kementerian Koperasi dan UMKM

- ✓ Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi, dan UMKM merumuskan tujuan Pembangunan tahun 2020-2024, yaitu :
 - Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan Modern dengan meningkatkan koperasi yang berkualitas dan modernisasi koperasi;
 - Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global dengan hasil transformasi usaha mikro dari informal ke formal, transformasi UKM masuk ke dalam rantai pasok, dan pertumbuhan wirausaha produktif;
 - Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi dengan hasil meningkatnya tata Kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi.
- ✓ Sasaran strategis Kementerian koperasi dan UMKM tahun 2020 – 2024 adalah :
 - Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern;
 - Transformasi usaha mikro dari informal ke formal;
 - Transformasi UKM masuk ke dalam rantai pasok;
 - Pertumbuhan wirausaha produktif
 - Terwujudnya kebijakan KUMKM yang berkualitas;
 - Terwujudnya data dan informasi KUMKM yang andal dan terintegrasi;

- Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian koperasi dan UKM;
 - Terwujudnya pemberdayaan KUMKM yang efektif;
 - Terwujudnya profesionalitas ASN di Kementerian Koperasi dan UKM;
 - Nilai akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementerian koperasi dan UKM.
- B. Permasalahan, hambatan, dan pendorong yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah :
1. Belum dimilikinya seluruh data potensi Koperasi di Kota Bekasi, faktor yang menghambat rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, pendorongnya banyak koperasi yang potensial di Kota Bekasi;
 2. Data dan informasi KUMKM belum sepenuhnya andal dan terintegrasi, dengan faktor penghambatnya kurangnya monitoring dan evaluasi pendataan koperasi dan UMKM, dan pendorongnya karena adanya pengembangan aplikasi SIP3 yang rencananya akan terintegrasi dengan aplikasi SIMPKL.
- C. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional
- Dalam menyusun beberapa dokumen perencanaan perlu memperhatikan isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan Renja juga penting untuk mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara regulasi lain yang berlaku akan menjadi acuan bagi penyusunan Renja misalnya UU atau PP atau Permen atau Perda atau Perwal yang mengatur secara lebih detail sampai dengan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJPN Tahun 2005-2025 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 juga telah mengarustamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai Gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005-2025 ditetapkan 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai kerangka 17 kaidah pembangunan, yaitu :

1. Membangun Kemandirian

Berupaya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata Kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- ❖ Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki *skill* dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan;
- ❖ Mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa;
- ❖ Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri;
- ❖ Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia; dan
- ❖ Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Keadilan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proposional, dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain :

- ✚ Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara;
- ✚ Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan;

- ✚ Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggungjawab;
 - ✚ Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan;
 - ✚ Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas; dan
 - ✚ Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga tiap orang paham hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.
3. Menjaga Keberlanjutan
- Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain :
- Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi;
 - Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi;
 - Mempertimbangkan keberadaan dan pola social budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan;

- Terpatrinya orientasi sikap (attitude) yang bertanggungjawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju;
- Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan; dan
- Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integrative.

Dalam membuat rencana kerja tahunan dapat memprioritaskan kebijakan yang bersih, demokratis, partisipatif, dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, penyelarasan rencana kerja dan program prioritas nasional.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk bidang perkoperasian, UMKM dan sektor informal diantaranya sebagai berikut:

1. Respon masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghimpun kekuatan ekonomi/modal sendiri masih rendah;
2. Kualitas pengelola koperasi tentang perkoperasian masih kurang karena *basic*/dasar Pendidikan para pengurus bervariasi;
3. Belum terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi karena koperasi belum mendapatkan proteksi dalam bentuk jaminan pemerintah (Lembaga penjamin simpanan) seperti Lembaga Keuangan;
4. Respon pelaku UMKM terhadap kegiatan sangat kurang dikarenakan pelaku UMKM sulit meninggalkan kegiatan bisnis kesehariannya;

5. Kemampuan Pendidikan pelaku UMKM sangat bervariasi sehingga sulit menyatukan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan atau program;
6. Keterbatasan akses pasar dan modal dikarenakan ukuran aktifitas bisnisnya sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan *networking*;
7. Terbatasnya lahan untuk relokasi PKL;
8. Rendahnya kesadaran hukum PKL;
9. Belum maksimalnya penegakan hukum bagi PKL yang melanggar ataupun kepada oknum yang memanfaatkan PKL.

Dari tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi perlu mengantisipasinya dengan berbagai program kegiatan seperti melaksanakan sosialisasi perkoperasian secara intens, fasilitasi pendirian koperasi di lingkungan masyarakat (koperasi masjid berbasis syariah yang sudah didukung dengan ditetapkannya SK Wali Kota Bekasi Nomor 518/Kep.448-Ek/XI/2018 tentang Kegiatan Pembentukan Koperasi Masjid Berbasis Syariah di Kota Bekasi), program dana bergulir dari APBD Kota Bekasi, pembentukan konsorsium bisnis koperasi.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang menyangkut UMKM dimana pelaku UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya, yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi perlu dilaksanakan fasilitasi pengembangan para pelaku UMKM dalam kapasitas SDM, akses pasar, akses permodalan, aspek kemitraan, aspek teknologi dan aspek legal yang akan mempengaruhi kontribusi terhadap PDRB perekonomian. Sedangkan untuk menangani hambatan dan masalah sektor informal dalam hal ini penanganan PKL perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, melakukan penertiban dan pendekatan secara persuasive kepada para PKL serta membantu dalam akses permodalan dan peningkatan kemampuan SDM baik dalam penguasaan teknologi dan pengembangan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah, Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan saya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tahun 2024 adalah: (1) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM), serta Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tahun 2024 adalah: (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.

- E. Setelah dianalisis terdapat beberapa rumusan isu-isu strategis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi, antara lain adalah :
1. Koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat (*agent of development and change*) yang akan memperkuat perekonomian masyarakat sehingga penguatan kelembagaan koperasi perlu dilakukan;
 2. Penataan ruang public untuk PKL dimaksudkan untuk menetapkan lokasi berusaha bagi PKL sehingga PKL bisa meningkatkan kemampuan berusaha dan mempromosikan usaha PKL pada lokasi yang semestinya dan *event Sunday Market* yang dibantu dengan perkuatan modal PKL melalui BPRS Patriot.

Hal ini penting dilakukan karena PKL atau sektor informal menyerap tenaga kerja dan mendukung Tema Pembangunan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Daerah;

3. Dalam rangka UMKM berdaya saing diperlukan penguasaan teknologi dan internet yang menjadi penunjang kesuksesan usaha UMKM.

Penguasaan teknologi ini bisa berbentuk produk ataupun aplikasi yang mampu membuat usaha UMKM efisien serta aplikasi berbasis android yang dirancang untuk memasarkan produk UMKM Indonesia secara online dan terintegrasi sistem. UMKM juga didorong untuk mengembangkan kualitas produknya sehingga produk lokal dapat menjadi produk unggulan daerah.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2024-2026 adalah : **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024 bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi bertanggungjawab atas penyelenggaraan prioritas daerah terkait Pelayanan Izin Simpan Pinjam dan Pengembangan UMKM. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sudah terakomodir kebutuhannya, namun terdapat perbedaan besaran pagu anggaran menyesuaikan analisis kebutuhan perangkat daerah dan proyeksi pendapatan daerah.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				RP 9.249.646.988					RP 8.556.279.600	
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 8.998.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 8.998.000	
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 7.425.410.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 7.425.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menenrima Gaji dan Tunjangan ASN	702 Orang/ Bulan	Rp 7.419.410.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menenrima Gaji dan Tunjangan ASN	1.176 Orang/ Bulan	Rp 7.389.673.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 6.000.000	
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 99.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Rp 60.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp 51.250.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Rp 20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Rp 48.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 563.381.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 573.958.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	8 Paket	Rp 300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 23.381.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 23.381.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 160.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	Rp 50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp 45.577.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	Rp 50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	Rp 44.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Rp 44.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 1.028.217.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 44.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.028.217.120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 44.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 410.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 390.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Rp 140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Rp 140.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp 50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp 50.000.000	
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 100.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 100.000.000	
			Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2 %	Rp 100.000.000			Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	2 %	Rp 100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Unit Usaha	Rp 100.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Unit Usaha	Rp 100.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	Rp 100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	Rp 100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 40.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 55.000.000	
			Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10 %	Rp 40.000.000			Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	10 %	Rp 55.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	116 Unit Usaha	Rp 40.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	116 Unit Usaha	Rp 55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	116 Unit Usaha	Rp 40.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	116 Unit Usaha	Rp 55.000.000	
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp 270.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp 250.000.000	
			Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4 %	Rp 270.000.000			Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	4 %	Rp 250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	Rp 270.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Unit Usaha	Rp 250.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	65 Unit Usaha	Rp 270.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	65 Unit Usaha	Rp 250.000.000	
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp 500.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Rp 275.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Pengurus yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	3 %	Rp 500.000.000			Persentase Pengurus yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	3 %	Rp 275.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Peserta dan Pendidikan Pelatihan	720 Orang	Rp 500.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Peserta dan Pendidikan Pelatihan	300 Orang	Rp 275.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	720 Orang	Rp 500.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	Rp 275.000.000	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 457.999.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 465.385.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	0.2 %	Rp 457.999.100			Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	0.2 %	Rp 465.385.100	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.050 Unit Usaha	Rp 457.999.100	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.050 Unit Usaha	Rp 465.385.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota	1.050 Unit Usaha	Rp 457.999.100	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kab/Kota	1.050 Unit Usaha	Rp 465.385.100	
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp 710.361.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp 710.361.000	
			Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	10 %	Rp 710.361.000			Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	10 %	Rp 710.361.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan	10 %	Rp 710.361.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan	10 %	Rp 484.441.900	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65 Unit Usaha	Rp 110.361.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65 Unit Usaha	Rp 110.361.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	Rp 150.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	Rp 141.650.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	75 Unit Usaha	Rp 300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	19 Orang	Rp 100.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	Rp 150.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	Rp 132.430.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp 1.575.006.200	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp 2.227.751.100	
			Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	0.10 %	Rp 1.575.006.200			Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	0.10 %	Rp 2.227.751.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	0.1 %	Rp 1.575.006.200	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	0.1 %	Rp 2.227.751.100	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	675 Unit Usaha	Rp 1.575.006.200	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Bekasi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	850 Unit Usaha	Rp 2.227.751.100	
TOTAL PAGU					Rp 13.193.374.420	TOTAL PAGU					Rp 12.413.857.700

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2024 akan disampaikan usulan kegiatan dari hasil pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bekasi untuk tahun 2025 yang ditujukan ke Perangkat Daerah Kota Bekasi. Belum terdapat usulan program dan kegiatan yang ditujukan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOPUKM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Telaahan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan nasional yaitu terkait arah kebijakan dan/atau tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Disamping itu, perlu ditelaah Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan,

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja PD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis PD yang akan ditangani pada Renja Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional, dilakukan juga penelaahan terhadap Visi-Misi, Sasaran dan Program Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025. Tujuan Pembangunan Kota Bekasi untuk Periode 2024-2026 adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel;
2. Terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan;
3. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman;
5. Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota.

Sedangkan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi;
4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsive gender;
6. Meningkatnya tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat kota;
7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan;
8. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat;
9. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana;
10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa, dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi;
11. Meningkatnya daya beli masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah melaksanakan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat

daerah, Lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Untuk Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendukung pencapaian tema pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025 yaitu “*Peningkatan Ekonomi Masyarakat*”, dengan prioritas pembangunan antara lain:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Peningkatan “*Urban Farming*” melalui bantuan hibah kompetitif;
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal;
5. “*Link dan Match*” program pemagangan kerja dengan dunia usaha;
6. Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);
7. Penggunaan “*Saving Land/Land Banking*”
8. Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
9. Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sekolah Inklusif);
10. Subsidi biaya Pendidikan di sekolah swasta untuk siswa kurang mampu;
11. Peningkatan kualitas Pendidikan di Pondok Pesantren.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui startegi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan melalui digitalisasi koperasi, *Start Up*

Digitalisasi marketing (inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi Simpkl.go.id yang online sehingga dapat diakses oleh operator di kecamatan se-Kota Bekasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

Berdasarkan telaahan-telaahan tersebut di atas, Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki dua tujuan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM).

Berikut tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja DISKOPUKM		Nilai AKIP	76.00
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran DISKOPUKM	Nilai AKIP	76.00
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Jasa (Koperasi dan UMKM)		Persentase Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM	0.14 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1 %
			Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM	1 %

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melaksanakan 8 (delapan) Program, yang terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yaitu penyusunan perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus memastikan Program Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 akan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renja), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan melaksanakan Program Kordinasi dan

Sinkronisasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, yang didukung dengan kegiatan-kegiatan koordinasi di berbagai bidang.

Berikut uraian secara rinci program-program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Pengembangan UMKM.

Secara rinci berikut ini adalah program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKP.1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	9.007.055.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	9.581.627.120
						IKP.2	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
						IKP.3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur		100%				100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	3 Laporan	8.998.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	5.000.000
2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	8.998.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	5.000.000
2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	6.893.535.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU		100%	7.435.410.000
2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	1.176 Orang/Bulan	6.887.535.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU		702 Orang/Bulan	7.429.410.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	6.000.000
2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	99.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	100.000.000
2	17	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	1 Paket	51.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	60.000.000
2	17	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Orang	40.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	573.958.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	564.376.640
2	17	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Paket	290.000.000
2	17	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	23.381.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	25.000.000
2	17	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	25.000.000
2	17	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	20.000.000
2	17	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	160.376.640

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	45.577.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	44.000.000
2	17	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	Kota Bekasi	100%	44.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	40.000.000
2	17	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Unit	44.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	40.000.000
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	12 Laporan	997.314.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.056.840.480
2	17	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	997.314.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.056.840.480

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Bekasi	100%	390.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	380.000.000
2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	210.000.000
2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	14 Unit	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Unit	120.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit	50.000.000
2	17	2			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	Kota Bekasi	2%	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2%	100.000.000
2	17	2	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Usaha	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	2	201	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Usaha	100.000.000
2	17	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	10%	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	40.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	3	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		116 Unit Usaha	40.000.000
2	17	3	201	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan dan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		116 Unit Usaha	40.000.000
2	17	4			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	Kota Bekasi	4%	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4%	270.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65 Unit Usaha	270.000.000
2	17	4	201	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65 Unit Usaha	270.000.000
2	17	5			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Kota Bekasi	3%	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%	475.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	5	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Peserta dan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	720 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		720 Orang	475.000.000
2	17	5	201	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bekasi	300 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		720 Orang	475.000.000
2	17	6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahnya	Kota Bekasi	0.2%	465.385.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.2%	518.911.000
2	17	6	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Bekasi	135 Unit Usaha	465.385.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.075 Unit Usaha	518.911.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	6	201	01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	135 Unit Usaha	465.385.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.075 Unit Usaha	518.911.000
2	17	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang Telah Ditetapkan	Kota Bekasi	10%	828.471.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	660.973.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	7	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi Pemberdayaan	Kota Bekasi	10%	828.471.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10%	660.973.000
2	17	7	201	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	110.361.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	-
2	17	7	201	4	Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bekasi	50 Unit Usaha	141.650.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	7	201	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kota Bekasi	19 Orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75 Orang	410.973.000
2	17	7	201	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha dan Kewirausahaan	Kota Bekasi	97 Orang	476.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	250.000.000
2	17	8			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	0.1%	2.498.521.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.1%	2.047.800.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	17	8	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	Kota Bekasi	0.1%	2.498.521.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0.1%	2.047.800.200
2	17	8	201	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design Teknologi	Kota Bekasi	900 Unit Usaha	2.498.521.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.920	2.047.800.200
TOTAL										Rp 13.479.433.500			Rp 13.694.311.320

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 merancang strategis pembangunan secara komprehensif mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Program prioritas disusun selaras sekaligus untuk mendukung pemenuhan target tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026. Program pembangunan daerah jumlahnya sangat banyak, namun tidak semua program akan menjadi prioritas dalam jangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Program Prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kota Bekasi 2024-2026 sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , diantaranya adalah :

1. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang professional, dinamis, Inovatif dan Akuntabel;
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan;
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman;
5. Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota;

Selain menunjang tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi, beberapa program prioritas juga menunjang terhadap Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah, beberapa rumusan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan “*Urban Farming*” melalui bantuan hibah kompetitif;
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal;
5. “*Link and Match*” program pemagangan kerja dengan dunia usaha;
6. Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);
7. Pembangunan “*Saving Land/Land Banking*”;
8. Pengentasan Rumah Layak Tidak Huni (Rutilahu);
9. Peningkatan kualitas Pendidikan (Sekolah Inklusif);
10. Subsidi biaya Pendidikan di sekolah Swasta untuk siswa kurang mampu;
11. Peningkatan kualitas Pendidikan di Pondok Pesantren.

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
2. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM berbasis kolaborasi;
4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
5. Peningkatan Kerjasama dengan DKM Masjid untuk mewujudkan Koperasi berbasis syariah;
6. Peningkatan Database KUMKM.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dalam program dan kegiatan. Inovasi yang akan dilaksanakan meluli digitalisasi koperasi, *Start Up* Digitalisasi marketing (Inkubator UMKM) dan pengembangan aplikasi Simpkl.go.id yang online sehingga dapat diakses oleh operator di kecamatan se-Kota Bekasi.

Adapun total pendanaannya untuk program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.479.433.500,- (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Bekasi. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025 berikut pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Tabel 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Keterangan
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKP.1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	9.007.055.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
							Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur		100%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	8.988.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	8.988.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	6.893.535.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU	
2	17	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	828 Orang/Bulan	6.887.535.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DAU	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	99.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	1 Paket	51.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	573.958.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	8 Paket	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	23.381.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Dokumen	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	45.577.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	Kota Bekasi	100%	44.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Unit	44.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	997.314.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	997.314.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Bekasi	100%	390.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	5 Unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	14 Unit	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	2			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	Kota Bekasi	2%	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	2	201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	2	201	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	100 Unit Usaha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	10%	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	3	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi sesuai Peraturan Perkoperasian	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	3	201	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Bekasi	116 Unit Usaha	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	4			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	Kota Bekasi	4%	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	4	201	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	5			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Kota Bekasi	3%	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	5	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	300 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	5	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Bekasi	300 Orang	275.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	Kota Bekasi	0.2%	465.385.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	6	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Bekasi	135 Unit Usaha	465.385.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	6	201	0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	135 Unit Usaha	465.385.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang Telah Ditetapkan	Kota Bekasi	10%	828.471.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan	Kota Bekasi	10%	828.471.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	65 Unit Usaha	110.361.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Bekasi	50 Unit Usaha	141.650.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	7	201	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Kota Bekasi	19 Orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	7	201	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	50 Orang	476.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	8			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Kota Bekasi	0.1%	2.498.521.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2	17	8	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil yang Dikembangkan	Kota Bekasi	0.1%	2.498.521.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	17	8	201	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Design Teknologi	Kota Bekasi	850 Unit Usaha	2.498.521.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
TOTAL										Rp 13.479.433.500	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dengan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bidang-bidang dalam menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran dan target renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025.

Adapun upaya yang akan dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi untuk mencapai rencana kerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
2. Pengembangan pasa dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM center maupun untuk pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM berbasis kolaborasi;
4. Mendorong umbuhya wirausaha baru dengan kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
5. Peningkatan Kerjasama dengan DKM Masjid untuk mewujudkan Koperasi berbasis syariah;
6. Peningkatan Database KUMKM.

Berdasarkan hal diatas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan Rencana kerja yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang-bidang;

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban untuk melaksanakan Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025;
3. Program-program yang tercantum dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen diharapkan dapat mengupayakan penguatan peran *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025, baik seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami hargai untuk perbaikan.

Bekasi, 13 September 2024

**Plt. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bekasi**



RITA HARTATI., M.M

Pembina.Tk I

NIP. 19680628 199403 2 012